BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era modern ini banyak sekali negara yang melakukan hubungan dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan negaranya. Dalam hubungan internasional tidak terlepas dengan hubungan yang dijalin tersebut terikat dengan hukum internasional, dengan adanya hukum internasional dalam hubungan internasional sangat berdampak positif dalam menjaga ketertiban hubungan antarnegara. Akan tetapi, banyak pula negara yang menyalahi hukum internasional dalam melakukan hubungan internasional dengan negara lain. Hubungan antar negara pada dasarnya berada dalam dua kondisi yang saling bertentangan, yaitu konsidi damai atau sengketa. Kadang-kadang dalam hal tertentu berada dalam kondisi bersengketa, tetapi damai seperti India dan Pakistan tentang Kashmir, Korea Utara dan Korea Selatan. Akan tetapi dalam sengketa internasional dapat mencakup kasus-kasus lain yang berada dalam lingkup peraturan internasional salah satunya adalah wilayah teritorial, dimana wilayah teritorial menjadi sangat komplek manakala wilayah tersebut menjadi sengketa saling mengklaim antar negara yang berbeda.

Kanca perpolitikan di Asia Tenggara yang dinamis, dimana kestabilan politik di wilayah itu sedang dihadapkan oleh adanya pergolakan politik dalam sengketa-sengketa klaim seperti kepulauan Spratly dan Paracel yang terletak di wilayah Laut

Tiongkok Selatan. Konflik di Laut Tiongkok Selatan tidak bisa dilepaskan dari persoalan kebutuhan akan sumber daya yang langka seperti minyak, ikan, dan sampai tingkat tertentu, transportasi. Minyak menjadi incaran utama karena hingga saat ini perebutan untuk mendapatkan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui ini tidak dapat dilepaskan dari konflik militer bahkan invasi militer sebagaimana invasi Amerika ke Iraq tahun 2003 (Cipto, 2010 : 204). Sebagai negara calon adidaya baru di kawasan, Tiongkok telah mendemontrasikan kekuatan militernya untuk menyatakan klaim absolut atas wilayah sengketa seperti meluncurkan kapal induk terbarunya di sekitar perairan Laut Tiongkok Selatan serta penempatan personil angkatan laut di sekitar wilayah yang disengketakan. Sengketa klaim ini melibatkan Tiongkok dengan beberapa negara di Asia Tenggara seperti Vietnam, Filipina, Brunai Darussalam serta Malaysia dalam sengketa Spratly dan Paracel.

Tidak hanya menempatkan pasukan militernya, pihak Tiongkok juga melakukan pembangunan fisik di sekitar wilayah sengketa untuk memperkuat klaimnya, seperti pembangunan pos militer dan sistem pertahanan anti kapal di pulau itu serta pembangunan landasan pesawat terbang (http://www.smh.com.au/world/photos-reveal-china-building-on-reefs-in-disputed-waters-20140915-10h4r0.html, diakses 21 Mei 2016). Tindakan Tiongkok tersebut mendapat banyak kecaman keras dari berbagai pihak khususnya negara-negara yang bersengketa langsung dengan Tiongkok.

Seluruh kawasan Asia Tenggara merupakan daerah penyebaran rumpun Budaya dan bahasa Melayu-Austronesia, yaitu berasal dari pusatnya sekitar teluk

Tonkin dan lembah sungai Mekong (Rudy, 2005 : 94). Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang wilayahnya terbentang dari ujung selatan Tiongkok hingga utara Australia serta dari ujung timur daratan India hingga sebelah timur Papua Nugini (http://www.nationsonline.org/oneworld/map_of_southeast_asia.htm, diakses pada tanggal 28 April 2016). Asia Tenggara sendiri merupakan kawasan strategis karena letaknya yang berdekatan dengan wilayah perairan Laut Tiongkok Selatan. Laut Tingkok sendiri merupakan salah satu jalur penting pelayaran dunia yang membentang dari bagian barat Samudera Pasifik dan Samudera Hindia serta memiliki rute-rute penting pelayaran internasional yang terdiri dari Selat Malaka, Makasar, Sunda, dan Lombok (Kaplan, 2014 : 7). Menurut *U.S energy administration* lebih dari setengah jumlah pelayaran internasional dengan tonase besar dalam setahun melewati wilayah ini serta melayani sepertiga dari total seluruh pelayaran yang ada di dunia (Kaplan, 2014 : 7).

Wilayah Kepulauan Natuna sendiri merupakan wilayah yang terletak di sebelah utara Selat Karimata yang memisahkan pulau besar Sumatera dengan pulau besar Kalimantan. Kepulauan Natuna terdiri beberapa pulau-pulau kecil yang berbatasan langsung dengan tiga negara yaitu Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Sebagai salah satu wilayah dari kepulauan terluar di Indonesia, kepulauan Natuna merupakan lokasi yang sangat bernilai ekonomis karena dianggap sebagai lokasi cadangan gas alam terbesar di kawasan Asia Pasifik bahkan di Dunia. Salah satu dari pernyataan tersebut dipublikasikan PT. Premier Oil sebagai salah satu pemegang kontrak pengeboran minyak di blok Alpha-D Natuna yang menemukan potensi

sumber daya alam gas di Natuna mencapai angka 8,383 milliar barrel yang tersebar di beberapa lokasi (http://www.tribunews.com./tribunners/2010/11/20/profile-blok-natuna-cadangan-gas-terbesar-di-dunia, diakses 23 Mei 2016).

Munculnya klaim di wilayah ZEE Natuna ini terjadi pada tahun 1993 sebagai respon tindakan Indonesia terhadap klaim Tiongkok, dimana Pemerintah Indonesia melalui Menlu Ali Alatas memprotes peta klaim *nine-dash line* Tiongkok beserta ZEE Natuna di dalamnya. Insiden ini terjadi ketika Delegasi Tiongkok memaparkan presentasi dalam sebuah *workshop* diplomatik yang disponsori oleh Indonesia. Pemerintah Indonesia memilih untuk menggunakan jalur diplomatik namun tidak adanya komitmen yang serius dari pihak Tiongkok untuk menjawab protes tersebut ditambah keengganan pemerintah Indonesia untuk membawa masalah ini di dunia internasional menyebabkan masalah ini dianggap hilang begitu saja.

Masalah pengklaiman Tiongkok ini muncul kembali ke permukaan ketika pemerintah Tiongkok memublikasikan kembali peta *nine-dash line* yang di lampirkan bersamaan dengan *Notes Verbales* kepada Komisi Landas Kontinen PBB tahun 2009 yang mengundang protes dari negara-negara penyengketa dan Indonesia. Namun pihak Indonesia menyatakan tidak terjadi konflik langsung dengan pihak Tiongkok seperti yang dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa saat itu (http://internasional.kompas.com/read/2012/11/28/07480866/Kelicikan.Strategi.Kedaulatan.China, diakses 3 Mei 2016). Dalam pernyataannya tersebut, beliau menekankan bahwa Tiongkok tidak melakukan klaim atas wilayah Kepulauan Natuna melainkan yang kemudian ditegaskan dengan pernyataan lain yang mengatakan

bahwa Indonesia justru ingin mencoba menarik investor asing asal Tiongkok untuk bidang pengalengan ikan di wilayah sekitar Kepulauan Natuna (http://www.fpri.org/articles/2014/10/even-indonesia-concerns-over-chinas-reach-south-china-sea, diakses 3 Mei 2016). Namun di luar pernyataan tersebut, dari pihak Tiongkok mengindikasikan akan meningkatkan manuver militernya di wilayah Laut Tiongkok Selatan dalam rangka memperkuat klaim *nine-dash line*-nya termasuk wilayah ZEE perairan Natuna tersebut. Salah satu langkah pihak Tiongkok dalam menyikapi sengketa Laut Tiongkok Selatan adalah dengan melakukan pembangunan pangkalan militer di teluk Yaolong dan Hainan yang merupakan basis dari seluruh kapal militer yang beroperasi di wilayah Laut Tiongkok Selatan (http://www.fpri.org/articles/2014/10/even-indonesia-concerns-over-chinas-reach-south-china-sea, diakses 3 Mei 2016). Dengan adanya pembangunan pangkalan militer ini dapat menjadi gambaran bagaimana Tiongkok lebih mengedepankan pembangunan kekuatan militernya dalam menyelesaikan sengketa *nine-dash line* dibandingkan dengan jalan damai. Hal tersebutlah yang membuat Indonesia mewaspadai wilayahnya dengan melihat dan mengamatinya sebagai bentuk respon atas tindakan-tindakan Tiongkok terhadap Asia Tenggara dan Khususnya di ZEE Natuna Indonesia.

Sebagai salah satu negara yang memiliki posisi strategis di wilayah Asia Tenggara, Indonesia dianggap sebagai salah satu negara yang berpengaruh di kawasan, hal itu didukung oleh karakteristik wilayahnya yang berupa kepulauan serta lokasinya yang berbatasan langsung dengan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia

serta Laut Tiongkok Selatan. Posisi strategis Indonesia berpengaruh di kawasan Asia Tenggara, terlihat bentuk dari salah satu bukti terhadap signifikansi kehadiran Indonesia di kawasan Asia Tenggara adalah kontribusi Indonesia terhadap organisasi regional *Association of Southeast Asian Nation* atau ASEAN, dimana Indonesia banyak melakukan upaya mediasi terhadap sesama anggota ASEAN yang bertikai seperti kasus sengketa Malaysia-Filipina dalam kasus klaim Manila terhadap Sabah, serta penyelesaian kasus sengketa Candi Preah Vihear antara Thailand dengan Kamboja (http://nsc.anu.edu.au/documents/Indonesia-Article13.pdf. Diakses 28 April 2016). Selain fakta yang ada diatas tersebut Indonesia juga berperan penting dalam mewujudkan kestabilan keamanan di kawasan dengan mempromosikan rencana pembentukan ASEAN *security community* yang bertujuan untuk membangun wadah penyelesaian konflik bagi seluruh anggota ASEAN dengan jalan damai (http://www.nids.go.jp/english/publication/kiyo/pdf/2008/bulletin_e2008_3.pdf, diakses pada 28 April 2016).

Dalam keanggotaan Indonesia yang tergabung ke dalam anggota ASEAN. Tentunya untuk di ketahui bahwa Indonesia selain memiliki kontribusi terhadap kawasan Asia Tenggara melalui keanggotaan di ASEAN, Indonesia juga dikenal aktif dalam melakukan diplomasi pertahanan untuk mencapai stabilitas keamanan kawasan yaitu berupa patroli dan latihan perang bersama serta pendidikan (http://pusjianmar-seskoal.tnial.mil.id/Portals/0/Peningkatan%20Kerjasama%20Pertahanan%20Indonesia%20di%20Kawasan%20Asia%20Tenggara.pdf. Diakses 28 April 2016). Dengan adanya kegiatan diplomasi pertahanan ini menegaskan peran Indonesia sebagai aktor

penting di kawasan Asia Tenggara baik dalam hal diplomasi maupun kekuataan militer, kedua hal inilah yang di yakini menjadi fondasi dasar bagi Indonesia untuk dapat memberikan kontribusi lebih banyak bagi kawasan Asia Tenggara. Sebagai aktor penting di kawasan, Indonesia juga memberi perhatian terhadap isu yang berkembang di kawasan. Adanya klaim *nine-dash line* Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan yang menyebabkan sengketa dan tidak hanya melibatkan negara-negara pengklaimnya saja namun juga Indonesia yang tidak termasuk sebagai negara pengklaim.

Meskipun bukan merupakan bagian dari kepulauan Spratly dan Paracel yang menjadi pusat persengketaan antara Tiongkok dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, wilayah ZEE Natuna ini dianggap sebagai bagian dari wilayah terluar dari *second chain island* yang merupakan bagian dari zonasi klaim *nine-dash line* Tiongkok. Klaim *nine-dash line* sendiri mempunyai dua zona wilayah, masing-masing adalah *first chain island* yang terbentang ratusan mil ke selatan dari pulau Hainan milik Tiongkok dan meliputi wilayah Perairan Jepang, Korea Selatan serta seisi wilayah Laut Tiongkok Selatan, sedangkan *second chain island* meliputi wilayah selatan Kepulauan Jepang hingga wilayah kepulauan Guam dan Marianas (Huaqing, 2004 : 435).

Dikarenakan hal tersebut indonesia sedang diuji kapabilitasnya yang sekarang ini baru-baru mengemuka dengan di awali pengklaiman Tiongkok terhadap wilayah kepulauan Spratly dan Paracel yang terletak di Laut Tiongkok Selatan. Sebagai negara calon adidaya baru di kawasan, Tiongkok mendemontrasikan kekuatan

militernya seperti meluncurkan kapal induk terbarunya di sekitaran Laut Tiongkok Selatan dan berlanjut dengan pengklaiman Tiongkok dengan *nine-dash line*-nya terhadap ZEE Natuna Indonesia.

Salah satu hal yang menjadi pemicu adanya klaim Tiongkok atas wilayah kepulauan adalah dengan adanya fakta bahwa kawasan tersebut merupakan salah satu lokasi cadangan gas alam terbesar di dunia dan potensi perikanan yang cukup besar (http://www.bloomberg.com/news/2014-04-07/indonesia-seeks-china-clarity-on-south-china-sea-intentions-1-html, diakses 3 Mei 2016).

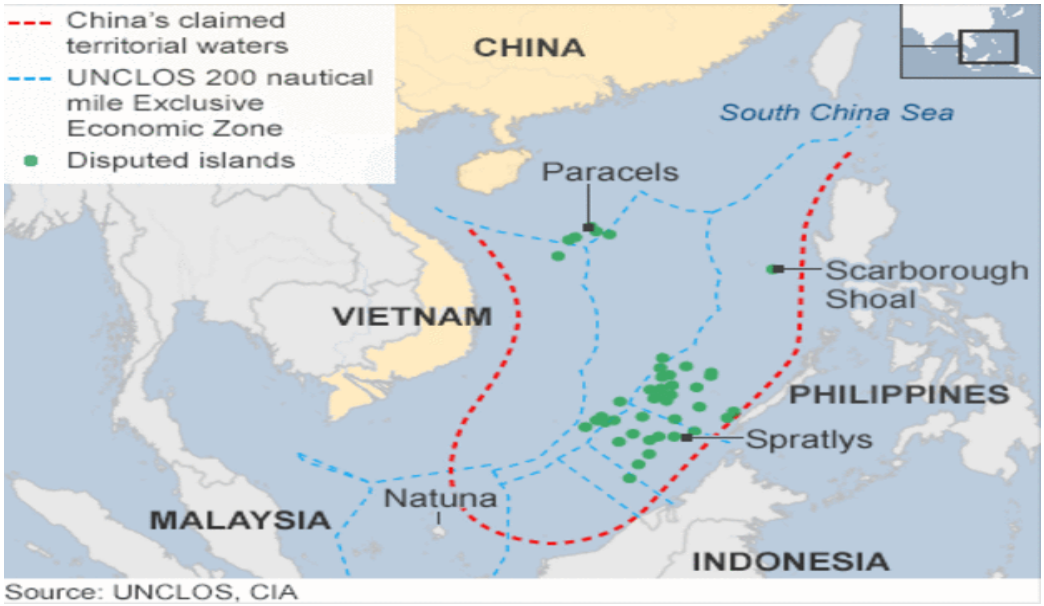
Selain karena adanya potensi besar dalam sumber daya alamnya wilayah Kepulauan Natuna juga termasuk wilayah strategis karena merupakan salah satu jalur Laut Kepulauan Indonesia tingkat 1 serta merupakan tumpuan transportasi bagi masyarakat sekitar dalam menjalankan kegiatan ekonomi mereka (http://bappeda.natunakab.go.id/attachments/article/124/BAB%20IV%20ANALISIS%20ISU-ISU%STRATEGIS.pdf, diakses 21 Mei 2016). Melihat dari fakta tersebut yaitu potensi besar di ZEE Natuna, kita dapat melihat bahwa wilayah Kepulauan Natuna memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi Indonesia, dalam hal perekonomian apabila pemerintah Indonesia mampu memperdayakan sebagian besar dari jumlah cadangan gas alam yang terdapat di Natuna, maka Indonesia sekiranya akan mampu mendapat keuntungan sekitar US$ 628,725 miliar atau sekitar Rp 6.287,25 Trilliun atau sekitar enam kali lebih banyak dari APBN Indonesia pada tahun 2010.

Walaupun upaya tersebut belum dinyatakan sikap resmi terkait klaim Tiongkok tersebut, namun Indonesia sudah melakukan beberapa tindakan antisipasi terkait dengan hal tersebut. Salah satu upaya Indonesia yang dapat dikaitkan secara langsung dengan tindakan antisipasi tersebut adalah upaya peningkatan fasilitas pangkalan udara yang dapat mengakomodasi pesawat sukhoi Su-27 dan Su-30 agar dapat ditempatkan disana. Selain itu Indonesia juga memodifikasi strategi pertahanannya dengan mengubah kawasan Natuna sebagai salah satu kawasan pertahanan strategis ke dalam rencana *Minimum Essential Forces* (MEF) (http://chinadailymail.com/2014/05/23/indonesia-joins-push-against-china-beeds-up-air-force-in-south-china-sea/. Diakses 21 Mei 2016).

Menurut pihak Tiongkok, mereka berhak untuk mengajukan klaim atas wilayah perairan sekitar Kepulauan Natuna berdasarkan juridiksi diperbolehkannya klaim berdasarkan fakta sejarah bahwa wilayah ZEE Natuna merupakan wilayah pemancingan para nelayan tradisional Tiongkok zaman dahulu. Fakta sejarah Tiongkok ini kemudian didukung dengan adanya undang-undang laut milik Tiongkok yang dikeluarkan pada tahun 1998 tentang ZEE dan landasan kontinental. Undang-undang laut Tiongkok ini sendiri belum memiliki dasar argumen yang kuat untuk dipergunakan dalam kasus sengketa ZEE Natuna ini karena tidak sesuai dengan konvensi UNCLOS yang diratifikasi oleh Tiongkok pada tahun 1992 (http://aspistrategist.org.au/chinas-claims-and-strategic-intent-in-the-south-china-sea-part-1/, diakses 29 April 2016). Tidak hanya itu, pihak Tiongkok sendiri sudah mengajukan dasar klaimnya kepada perserikatan bangsa-bangsa untuk melakukan uji

materi terhadap kepemilikan sebagian besar wilayah Laut Tiongkok Selatan (http://aspistrategist.org.au/chinas-claims-and-strategic-intent-in-the-south-china-sea-part-1/, diakses 29 April 2016).

Dalam pernyataan Bambang Hendratno, seorang pejabat senior militer di Natuna. Natuna merupakan pulau terjauh di Indonesia perlu adanya penambahan pasukan lebih lanjut di Natuna, tidak harus menunggu sampai terjadi sesuatu dikarenakan Malaysia dan China sudah masuk ke bentrokan menyangkut klaim-klaim, Sebelum terjadi sesuatu perlu adanya tindakan Bukannya setelah sesuatu terjadi (http://www.bbc.com/news/world-asia-29655874, diakses pada 16 Juni 2016)



Sumber : http://www.bbc.com/news/world-asia-29655874 diakses 16 Juni 2016

Gambar 1.1
Garis Sembilan Dash Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan

Data diatas adalah data peta dari Tiongkok. Dalam melihat peta tersebut "Pulau Natuna terletak di utara di Laut Cina Selatan dan zona potensi konflik di mana garis sembilan-dash China dan zona ekonomi eksklusif Indonesia ini di lepas pantai Natuna seperti pernyataan Iis Gindarsah seseorang peneliti pertahanan di pusat studi strategis".

Penelitian-penelitian mengenai klaim *nine-dash line* Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan salah satunya adalah karya ilmiah berupa skripsi yang telah dilakukan oleh Gunawan Wisnu Saputra tentang masalah yang diambil berjudul Strategi Indonesia Dalam Mangamankan Natuna Dari Klaim Tiongkok yang dibuat pada tahun 2015 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada penelitian tersebut peneliti meneliti tentang meningkatkan pengamanan di kawasan teritorial yaitu dengan membangun pangkalan militer di daerah Natuna dan melakukan latihan gabungan dengan negara lain. Perbedaan penelitian karya Gunawan dengan penelitian ini adalah langkah sebagai upaya dari kepentingan nasional Indonesia sebagai aktor utuma dalam menjalankan kebijakan, dimana dari kepentingan tersebut menimbulkan suatu bentuk respon atas kedaulatan, yaitu respon Indonesia terhadap kla*im nine-dash line* oleh Tiongkok yang melewati wilayah kedaulatan Indonesia di ZEE Natuna.

Penelitian lainnya yaitu karya ilmiah berupa skripsi yang dilakukan oleh Irawan Wibiksana tentang masalah yang diambil berjudul Klaim Teritorial Tiongkok di Perairan Laut Tiongkok Selatan dan Respon Filipina (Analisa Strategi Filipina Sebagai Respon Atas Klaim Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan) yang dibuat pada tahun 2016 Universitas Pasundan. Peneliti meneliti tentang bagaimana faktor

kepentingan yang mendorong Tiongkok untuk mengklaim hampir seluruh Laut Tiongkok Selatan, perseteruan antara Tiongkok dan Filipina di kepulauan Spratly, Terjadinya tumpang tindih antara negara-negara pengklaim terhadap kepulauan Paracel dan Spratly yang sangat kompleks sebab setiap negara pengklaim mengklaim teritorialnya. Jelasnya penelitian Irawan Wibiksana adalah menyangkut respon Filipina terhadap klaim Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan. Sedangkan pada penelitian ini adalah respon Indonesia terhadap klaim nine-dash line Tiongkok yang melewati wilayah zona ekonomi eksklusif Natuna, dimana adanya perbedaan negara yaitu Indonesia sedangkan penelitian Irawan Wibiksana adalah Filipina. tidak terjadinya tumpang tindih atas pengklaiman yaitu dengan dua negara Tiongkok dan Indonesia, mengembalikan kedaulatan atas wilayah teritorial Indonesia sebagai batas yang sah.

Berkaitan dengan kepentingan yang terdapat di wilayah tersebut peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian berupa :

Respon Indonesia terhadap Klaim *Nine-Dash Line* Tiongkok Yang Melewati Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna Indonesia (2009-2015)

Dengan demikian peneliti berkeinginan untuk menulis dalam bentuk skripsi dengan judul tersebut di atas, dan penelitian ini pula mendapat dukungan dari beberapa mata kuliah pokok di dalam Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM), yaitu :

1. Diplomasi HI di Asia Tenggara

   Mata kuliah ini mempelajari tentang pola interaksi dan gambaran dalam hubungan internasional khususnya di kawasan Asia Tenggara. Dalam hal tersebut secara langsung memberikan gambaran terutama terhadap Klaim *Nine-Dash Line* khususnya dikarenakan Klaim *Nine-Dash Line* sendiri yang menjadi objek penelitian dan klaim tersebut melewati batas kedaulatan Indonesia yaitu ZEE Natuna. Maka setidaknya mata kuliah tersebut memberikan beberapa gambaran dari keadaan dan latar belakang situasi negara yang tengah menjadi fokus utama bagi peneliti dan menjadi nilai tambah karena masih berkorelasi, terkait bagaimana sejarah, situasi politik, ekonomi, sosial maupun budaya serta hubungan diplomasi antar negara-negara di kawasan benua Asia Tenggara bahkan Asia Pasifik.

2. Hukum Internasional

   Mata kuliah ini mempelajari tentang sekumpulan peraturan hukum yang sebagian besar mengatur tentang prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh negara-negara dan hubungannya satu sama lain. Dalam hal ini, yang mana dari setiap pointnya berisi tentang pembahasan tentang norma-norma, nilai dan tata aturan yang disahkan, diakui dan dipraktikan pelaksanaannya di tengah masyarakat internasional demi penjagaan perdamaian dunia dan keadilan. Dan mata kuliah ini masih bisa dikatakan berkaitan dengan tema skripsi yang diambil yaitu tentang keterkaitan respon

Indonesia terhadap klaim *Nine-Dash Line* yang melewati batas wilayah ZEE Natuna Sebagai tindakan intervensi seperti yang dilaksanakan antara Tiongkok terhadap Indonesia dan sejauh mana ranah Hukum Internasional itu sendiri memainkan peranannya dalam menegakkan nilai dan norma yang berlaku untuk menghukum tiap-tiap bentuk pelanggaran dalam menciptakan keadilan yang sah dan bersifat internasional.

3. Studi Keamanan Internasional

   Pada mata kuliah ini mempelajari tentang isu-isu yang berkembang dalam kaitannya terhadap keamanan internasional. Dalam penelitian ini klaim sebagai gambaran akan seberapa pentingkah fungsi dan keberadaan klaim tersebut terhadap keamanan internasional.

4. Analisis Politik Luar Negeri

   Merupakan mata kuliah yang berkaitan dengan analisa interaksi yang melibatkan antar para aktor politik atau pihak-pihak pemerintahan yang memiliki cakupan yang meluas yaitu antar negara satu dengan lainnya. Sebab itu penelitian ini berkenaan dengan tema Politik Luar Negeri yang akan memberikan gambaran sebuah pengamatan terhadap proses politik, yang paling tidak memberikan beberapa wawasan terhadap situasi politik antar negara yang tengah berlangsung dan masih berkaitan terhadap objek dan tema skripsi yang sedang dikaji.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka peneliti merumuskan masalah, yaitu sebagai berikut :

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

"Bagaimana respon Indonesia terkait dengan klaim *nine-dash line* Tiongkok yang melewati wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna Indonesia?"

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

1. Apa kepentingan nasional Tiongkok terhadap klaim *nine-dash line* di wilayah ZEE Natuna Indonesia?
2. Apa kerugian dan akibat yang diterima Indonesia atas klaim *nine-dash line* Tiongkok terhadap wilayah ZEE Natuna Indonesia?
3. Bagaimana reaksi Indonesia terhadap klaim *nine-dash line* Tiongkok di wilayah perairan ZEE Natuna Indonesia?
4. Langkah-langkah diplomatik apa yang dilakukan Indonesia atas klaim *nine-dash line* Tiongkok di wilayah ZEE natuna Indonesia?

1.2.3 Pembatasan Masalah

Konflik klaim terbaru Tiongkok tersebut telah menjadi sorotan bagi perkembangan hubungan internasional terhadap isu keamanan masyarakat internasional. Hal ini di pandang oleh pemerintah Indonesia sebagai momentum untuk mengklarifikasi atas tindakan klaim yang dilakukan Tiongkok kepada Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna Indonesia, upaya yang dilakukan oleh Indonesia inilah dengan mengeluarkan respon untuk menyikapi klaim

Tiongkok yang melewati wilayah ZEE Natuna Indonesia pada tahun 2009. Dimana klaim Tiongkok menjalankan klaim tersebut secara sepihak atas kedaulatan di Laut Tiongkok Selatan dengan mengeluarkan paspor dengan peta daratan Tiongkok dan sembilan garis putus-putus yang berbentuk seperti huruf U di Laut Tiongkok Selatan (http://internasional.kompas.com/read/2012/11/28/07480866/Kelicikan.Strategi.Kedaulatan.China, diakses 3 Mei 2016). Berdasarkan pada rumusan permasalahan, maka dalam penelitian ini, peneliti melakukan pembatasan masalah yang akan di tetapkan pada respon Indonesia terhadap klaim Tiongkok yang di mulai pada tahun 2009 ketika Tiongkok menerbitkan peta *nine-dash line* terbaru di Perserikatan Bangsa-Bangsa hingga akhir tahun 2015 di era kepemimpinan Joko Widodo.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan maksud ingin mengetahui bagaimana respon Indonesia terhadap klaim *nine-dash line* Tiongkok yang melewati wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu :

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa apa kepentingan nasional Tiongkok terhadap klaim *nine-dash line* di wilayah ZEE Natuna Indonesia.

2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa apa kerugian dan akibat yang diterima Indonesia atas klaim *nine-dash line* Tiongkok terhadap wilayah ZEE Natuna Indonesia.
3. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa bagaimana reaksi Indonesia terhadap klaim *nine-dash line* Tiongkok di wilayah perairan ZEE Natuna Indonesia.
4. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa langkah-langkah diplomatik apa yang dilakukan Indonesia atas klaim *nine-dash line* Tiongkok di wilayah ZEE natuna Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian akan dibagi menjadi ke dalam dua bentuk yaitu :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman, wawasan serta bahan tambahan informasi hubungan internasional di Asia Tenggara, hukum internasional, studi keamanan internasional, analisis politik luar negeri dan pembelajaran khususnya bagi penstudi masalah-masalah hubungan internasional khususnya respon Indonesia yang akan melakukan penelitian terkait dengan topik tentang klaim *nine-dash line* Tiongkok yang berada di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti yang

akan melakukan penelitian terkait topik ini. Bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat memberi tambahan wawasan dan pengetahuan hubungan internasional.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah data-data empiris, ilmu, dan rekomendasi bagi para peneliti hubungan internasional dan juga masyarakat yang ingin mengetahui tentang pengklaiman *nine-dash line* Tiongkok yang melewati wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna dan pengaruhnya terhadap negara berupa respon Indonesia atas klaim Tiongkok. Bagi peneliti diharapkan dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan, pengalaman dan kemampuan peneliti di bidang Ilmu Hubungan Internasional. Bagi lembaga akademik diharapkan dapat berguna untuk bahan referensi bagi penstudi hubungan internasional dan umum.